

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan teori – teori menurut para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi sehingga dijadikan sebagai landasan teori dalam pelaksanaan penelitian penulis. Disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.1.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Sistem

Menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:1) sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.

Sedangkan menurut Azhar Susanto (2013: 22) sistem adalah kumpulan/grup dari subsistem/bagian/komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa sistem merupakan prosedur – prosedur yang saling berhubungan, bekerjasama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2.1.1.2 Definisi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Moh Mahsun dkk. (2016: 92) sistem akuntansi keuangan daerah adalah metode dan prosedur penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah yang ditetapkan di suatu pemerintah daerah. Sedangkan menurut Warsito Kawedar dkk. (2008: 52) sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Adapun menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Solihin (2017:58) sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah rangkaian suatu sistem akuntansi dari prosedur dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi dari proses pencatatan, pengikhtisaran hingga pelaporan keuangan.

2.1.1.3 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2017: 59) sistem akuntansi keuangan daerah meliputi:

- 1) Pencatatan
- 2) Pengikhtisaran
- 3) Pelaporan

Penjelasan indikator sistem akuntansi keuangan daerah sebagai berikut:

- 1) Pencatatan
 - a) Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.
 - b) Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal.
 - c) Memindah bukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.

- 2) Pengikhtisaran
 - a) Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi yaitu suatu daftar yang memuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldonya selama periode tertentu, diambil dari buku besar.
 - b) Pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang paling up to date.
 - c) Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yaitu neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan.
 - d) Pembuatan ayat jurnal penutup yaitu prosedur jurnal penutup diposting ke akun-akun bersangkutan sehingga setelah diposting, akun nominal akan nol.
 - e) Pembuatan neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca yang berisi daftar akun riil yang dibuat yang dibuat setelah dilakukan penutupan.
 - f) Pembuatan ayat jurnal pembalik yaitu apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dibuat ayat jurnal pembalik.
- 3) Pelaporan
Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi.

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2017: 13) laporan keuangan merupakan penyajian informasi keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Adapun menurut Ifat Fauziah (2018: 66) laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Sedangkan menurut V. Wiratna Sujarweni (2015: 115) laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan yang digunakan oleh pihak – pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal. Dan menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:38) laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Pengolahan data keuangan perusahaan diawali dari bukti-bukti transaksi yang berupa faktur, dokumen, nota, kuitansi dan bukti-bukti transaksi keuangan yang lainnya dan kemudian dicatatkan dalam pembukuan perusahaan sehingga hasil akhir dari proses pencatatan dan pengidentifikasian bukti itu akan akan menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan”.

Berdasarkan definisi - definisi diatas, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat keputusan.

2.1.2.2 Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2017:15) karakteristik pelaporan keuangan adalah ukuran – ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif tersebut menjadi prasyarat normatif yang diterapkan sehingga laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemda terdiri atas :

- 1) Relevan
- 2) Andal
- 3) Dapat dibandingkan
- 4) Dapat dipahami

Penjelasan indikator kualitas laporan keuangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Relevan mengandung pengertian bahwa laporan keuangan pemerintah daerah memuat informasi yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya yaitu:
 - a) Laporan keuangan memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya (*feedback value*).
 - b) Laporan keuangan memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk memprediksi masa yang akan datang (*predictive value*).
 - c) Laporan keuangan disajikan tepat waktu (*timeliness*) sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan.
 - d) Penyajian laporan keuangan memuat informasi yang selengkap mungkin (*completeness*) yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, dapat diverifikasi dan netral.

- a) Jujur, artinya bahwa laporan keuangan memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b) Dapat diverifikasi, artinya bahwa laporan keuangan memuat informasi yang dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda hasilnya harus tetap mempunyai kesimpulan yang sama.
- c) Netral, artinya bahwa laporan keuangan memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lainnya dengan syarat menetapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah menggunakan kebijakan akuntansi periode sebelumnya, maka perubahan tersebut harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

4) Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman dengan batas pemahaman pengguna laporan.

2.1.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2018: 27) akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban atas aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggung jawaban kepada masyarakat luas.”

Adapun menurut Warsito Kawedar dkk. (2008: 93) pengertian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.”

Sedangkan menurut UU nomor 15 Tahun 2004 pengertian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.”

Dan menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 pengertian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya”

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah kewajiban dalam mempertanggungjawabkan publik untuk melaksanakan proses pengelolaan keuangan .

2.1.3.2 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2018: 28) indikator dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah :

- 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum.
- 2) Akuntabilitas proses.
- 3) Akuntabilitas program
- 4) Akuntabilitas kebijakan

Penjelasan indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum. Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum yaitu mengenai jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik
- 2) Akuntabilitas proses. Akuntabilitas proses yang mengenai prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah baik dalam hal kecukupan sistem dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan tidak adanya *mark up* dan pungutan – pungutan lain diluar yang ditetapkan.
- 3) Akuntabilitas program mengenai pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal.
- 4) Akuntabilitas kebijakan yang pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017:93) kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang didefinisikan sebagai masalah yang penting.

2.2.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Mardiasmo (2018:204) untuk mendapatkan hasil laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipercaya pemerintah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

Sedangkan menurut Indra Bastian (2010:4) jika belum memahami sistem akuntansi, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan.

Adapun menurut Mahmudi (2016: 27) sistem akuntansi pemerintah daerah yang disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi dapat berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila terdapat masalah pada satu bagian dari siklus akuntansi tersebut dapat berakibat laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas.

Telah banyak peneliti yang telah mengkaji pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kadek Desiana Wati dkk. (2014) dan Luh Kadek Sri Megawati dkk. (2015) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

2.2.2 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Mursyidi (2013: 59) untuk mengetahui akuntabilitas dan kinerja keuangan suatu entitas atau instansi dapat dilihat dalam laporan keuangannya untuk satu periode atau pada saat tertentu. Untuk mencapai akuntabilitas maka laporan keuangan yang disampaikan harus berkualitas.

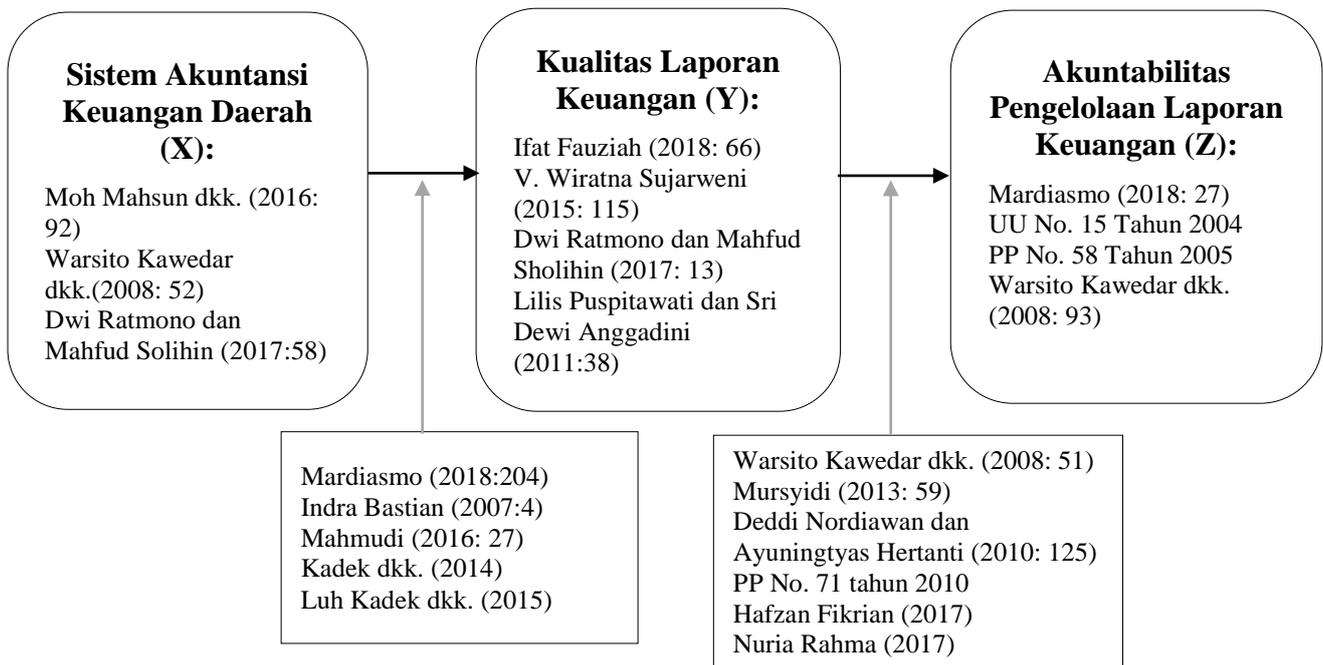
Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 bahwa tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Adapun menurut Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertanti (2010: 125) laporan keuangan memegang peranan penting dalam rangka menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Semakin besar tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan.

Adapun menurut Warsito Kawedar dkk. (2008: 51) salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah penyampaian laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disajikan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Beberapa peneliti terdahulu telah mengkaji pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hafzan Fikrian (2017) dan Nuria Rahma dkk. (2017) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.



Gambar 2.1
Paradigma Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Penulis mengansumsikan dalam pengambilan keputusan sementara (hipotesis) sebagai berikut:

- H1 : Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- H2 : Kualitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.